

SISTEM INFORMASI TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA KAMPUNG BERBASIS WEBSITE DI KAMPUNG PADANG RAHARJA

Dimas Setiawan¹⁾, Stanly Hance Dolfi Loppies²⁾, dan Selfina Pare³⁾

^{1,2,3)}Sistem Informasi, Fakultas Teknik-Universitas Musamus

Alamat e-mail: ¹⁾ds6073207@gmail.com, ²⁾stanly@unmus.ac.id, ³⁾selfina@unmus.ac.id

Abstrak

Transparansi pengelolaan dana kampung merupakan aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel dan partisipatif. Namun, di banyak kampung, termasuk Kampung Padang Raharja, praktik transparansi masih dilakukan secara manual melalui baliho, yang seringkali tidak menyajikan informasi secara rinci dan mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan rendahnya pemahaman warga terhadap alokasi dan penggunaan dana kampung, serta menimbulkan potensi ketidakpercayaan terhadap pemerintah kampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi berbasis website guna meningkatkan transparansi penggunaan dana kampung di Kampung Padang Raharja. Metode rekayasa perangkat lunak yang digunakan adalah *Waterfall*, dengan tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan sesuai dengan siklus hidup sistem (*System Development Life Cycle*). Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP, database MySQL, serta alat bantu perancangan seperti Microsoft Visio. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem informasi transparansi dana kampung berbasis website yang menyediakan fitur-fitur seperti informasi dana dan kegiatan kampung, profil kampung, serta kotak saran yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi, memperkuat kepercayaan publik, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan perencanaan pembangunan kampung.

Kata Kunci: sistem informasi, transparansi, dana kampung, Kampung Padang Raharja.

PENDAHULUAN

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa menyatakan bahwa dana desa (DD) merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dimanfaatkan serta digunakan sebaik mungkin untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat[1]. Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tujuan dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan[1].

Dana kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bertujuan untuk mendukung pemerataan Pembangunan di kampung-kampung. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan Dana kampung adalah transparansi dalam penggunaannya. Di Kampung Padang Raharja, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, meskipun sudah ada sistem pembukuan keuangan,

transparansi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) kepada masyarakat masih dilakukan secara manual, menggunakan baliho, pemberituannya di gabung tanpa realisasi penggunaan, contoh pelaporanya yaitu “bidang penyelenggaraan pemerintah kampung, bidang pelaksanaan pembangunan kampung, bidang pembinaan kemasyarakatan kampung, bidang pemberdayaan masyarakat kampung, terakhir bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak”.

Penggunaan baliho sebagai media transparansi dana kampung sering menimbulkan beberapa permasalahan seperti kurangnya informasi yang rinci pada baliho. Informasi yang ditampilkan terbatas pada total anggaran atau nama proyek tanpa ada penjelasan mengenai penggunaa dana. Hal itu membuat masyarakat kampung menjadi sulit dalam memahami penggunaan dana kampung telah tepat sasaran atau belum.

Transparansi dana kampung di beberapa kampung, seperti Kampung Sermayam Indah, Kampung Ngutibob, Kampung Soa, dan Kampung Padang Raharja, saat ini dilakukan melalui musyawarah kampung dan pemasangan baliho yang menampilkan secara garis besar setiap bidang oleh pemerintah kampung untuk berbagai kebutuhan masyarakat, baik sarana maupun prasarana. Peneliti telah mewawancarai lima puluh penduduk di Kampung Padang Raharja mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan transparansi, di kampung tersebut. Namun, banyak dari mereka yang tidak memahami atau tidak mengetahui tentang

transparansi yang ada di Kampung Padang Raharja dan penulis telah mewawancarai sekretaris kampung, musyawarah ini dihadiri oleh perwakilan masyarakat, termasuk ketua Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan anggota Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM). Selain itu, sosialisasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahunan oleh aparat kampung dilakukan dengan membagikan undangan kepada dua orang perwakilan dari setiap jalur untuk mengikuti musyawarah di balai kampung.

Diharapkan, dengan adanya sistem ini, transparansi pengelolaan dana kampung dapat ditingkatkan, sehingga memberikan dampak positif bagi Kampung Padang Raharja dalam hal keterbukaan dan kepercayaan publik. Sistem ini juga memiliki fitur profil kampung, informasi kegiatan kampung dan kotak saran sebagai tempat untuk Masyarakat memberikan saran/masukan program kegiatan untuk anggaran dana kampung tahun berikutnya.

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi adalah gabungan dari satu kesatuan beberapa jenis komponen yang saling terkait yang didalam terdapat pengumpulan, proses, penyimpanan, dan pendistribusian suatu informasi yang berguna sebagai pendukung proses pengambilan keputusan ataupun kedali dalam sebuah organisasi atau perusahaan [2].

B. Pengelolaan Keuangan Kampung

Pengelolaan keuangan kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Kampung, sehingga dengan adanya hak otonom tersebut diharapkan kampung dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan maupun mengelola pembelanjaan anggaran [3].

C. Pengertian Dana Kampung

Dana kampung merupakan bagian dari belanja pemerintah pusat dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di perkampungan[1].

D. Pengertian Pembukuan

Pembukuan keuangan adalah sebuah proses pencatatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data serta informasi keuangan yang terdiri dari harta, kewajiban, modal, biaya, jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada periode tersebut[4].

E. Pengertian Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak pihak yang membutuhkan informasi [5].

METODE PENELITIAN

A. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan diantaranya sebagai berikut:

1. Observasi

Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan peninjauan secara langsung pada objek penelitian.

2. Studi Literatur

Pada tahap ini penulis melakukan kajian terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian yang diambil seperti jurnal-jurnal, buku-buku serta situs yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Wawancara

Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mewawancarai beberapa narasumber diantaranya aparat Kampung Sarmayam Indah, Kampung Ngutibob, dan Kampung Soa dan Kampung Padang Rahaja. Dalam pengambilan data tersebut ada beberapa pertanyaan atau poin-poin yang sudah dibuat untuk diajukan langsung ke narasumber.

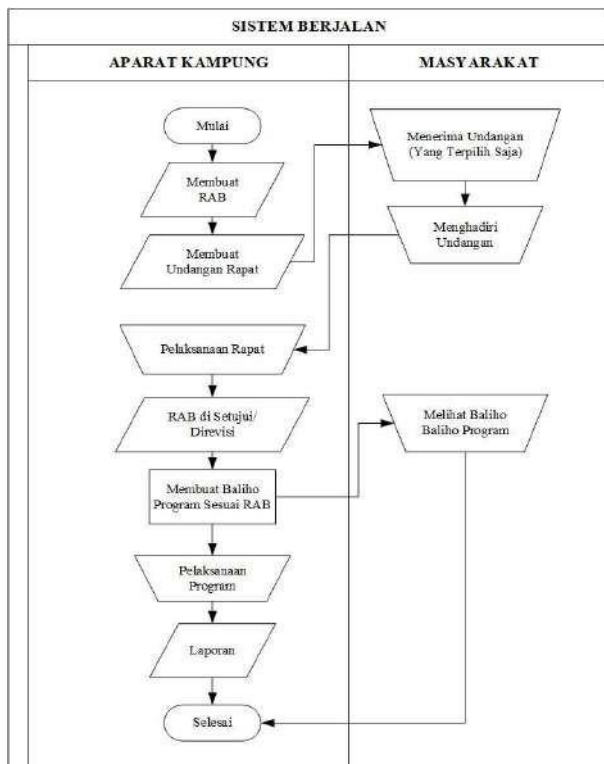
4. Dokumentasi

Dalam pengambilan data menggunakan teknik dokumentasi, dokumentasi dilakukan dengan menggunakan alat elektronik yaitu *handphone*. Dokumentasi dibuat dalam bentuk foto dan rekaman suara dengan narasumber.

B. Analisis Sistem

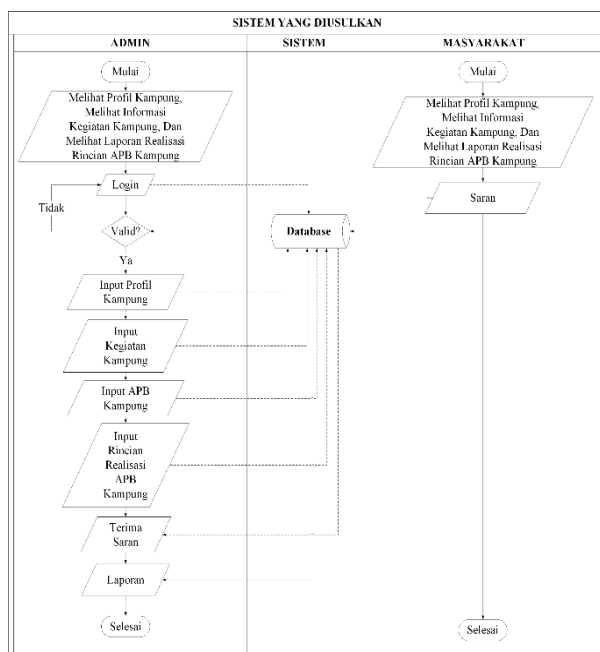
Analisis sistem ialah penjabaran dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam berbagai bagian komponennya dengan maksud agar bisa mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai macam masalah atau hambatan yang timbul pada sistem sehingga nantinya bisa dilakukan penanggulangan, perbaikan dan juga pengembangan.

1. Analisis Sistem Berjalan



Gambar 1. Sistem Berjalan

2. Analisis Sistem Diusulkan



Gambar 2. Sistem Diusulkan

C. Desain Sistem Diagram Konteks



Gambar 3. Use Case Diagram

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Implementasi Dari Perancangan Sistem

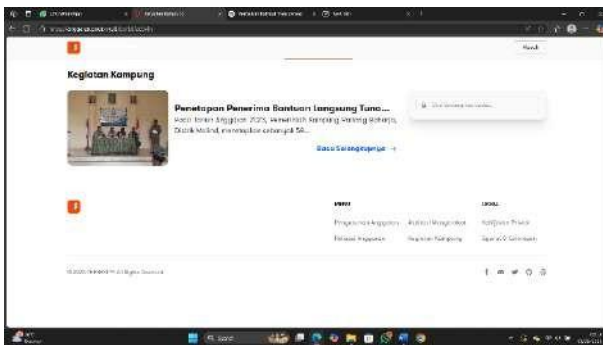
1. Halaman Informasi Profil Kampung
Halaman ini berfungsi sebagai pintu masuk utama dan memberikan gambaran umum mengenai kegiatan kampung, sejarah, geografis demografi, visi misi, dan struktur organisasi.



Gambar 4. Halaman Informasi Profil Kampung

2. Halaman Informasi Kegiatan Kampung

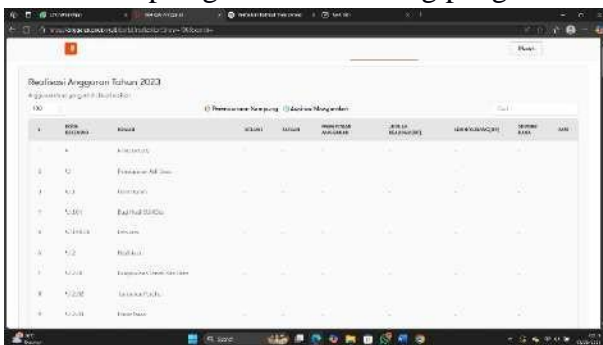
Halaman Kegiatan Kampung adalah bagian dari sistem transparansi yang menampilkan waktu, lokasi kegiatan, dan deskripsi yang dilakukan di kampung.



Gambar 5. Halaman Informasi Kegiatan Kampung

3. Halaman Informasi Realisasi APB Kampung.

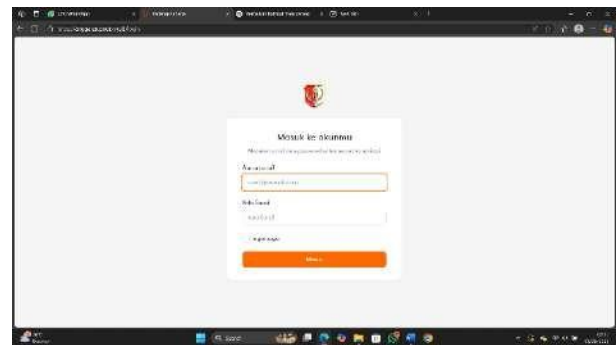
Halaman ini membandingkan antara anggaran yang direncanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) dengan realisasi dana yang telah digunakan dalam setiap kegiatan atau bidang pengeluaran.



Gambar 6. Halaman Informasi Realisasi APB Kampung

4. Halaman Login Admin

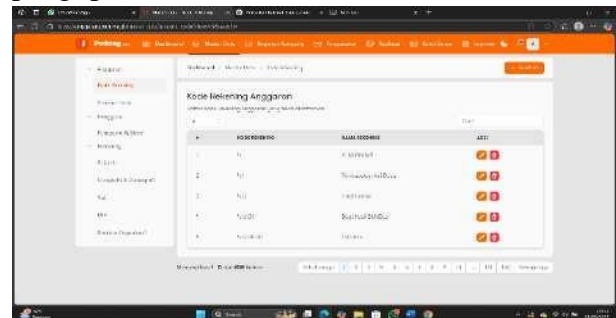
Halaman Login Admin adalah gerbang akses khusus bagi pengguna dengan hak istimewa (seperti admin kampung, operator sistem, atau petugas pengelola data) untuk masuk ke sistem informasi transparansi dana kampung.



Gambar 7. Halaman Login Admin

5. Halaman Input Master Data

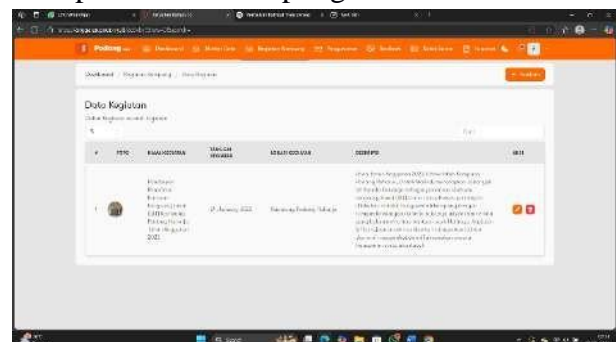
Halaman Master Data adalah halaman khusus yang berfungsi untuk mengelola data-data utama yang menjadi dasar dalam pengoperasian sistem.



Gambar 8. Halaman Input Master Data

6. Halaman Input Kegiatan Kampung

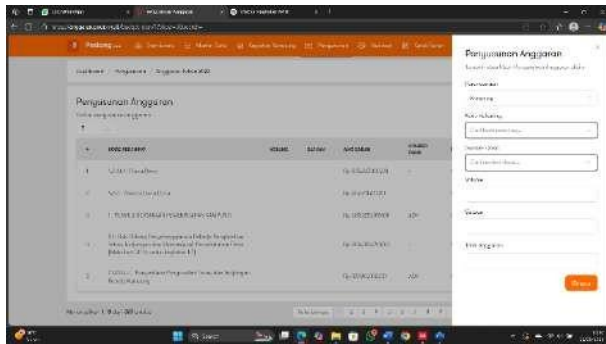
Halaman Input Kegiatan Kampung adalah fitur yang digunakan oleh admin/operator kampung untuk memasukkan data kegiatan yang direncanakan atau sedang dilaksanakan oleh pemerintah kampung.



Gambar 9. Halaman Input Kegiatan Kampung

7. Halaman Input Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK)

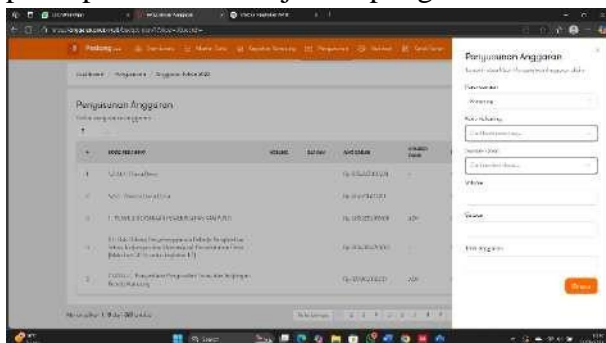
Halaman Input APB Kampung adalah fitur yang digunakan oleh admin kampung untuk mencatat dan mengelola rencana anggaran pendapatan dan belanja kampung.



Gambar 10. Halaman Input APB Kampung

8. Halaman Input Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK)

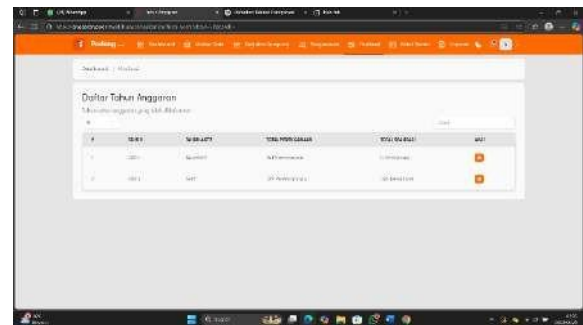
Halaman Input APB Kampung adalah fitur yang digunakan oleh admin kampung untuk mencatat dan mengelola rencana anggaran pendapatan dan belanja kampung.



Gambar 11. Halaman Input APB Kampung

9. Halaman input realisasi APB Kampung

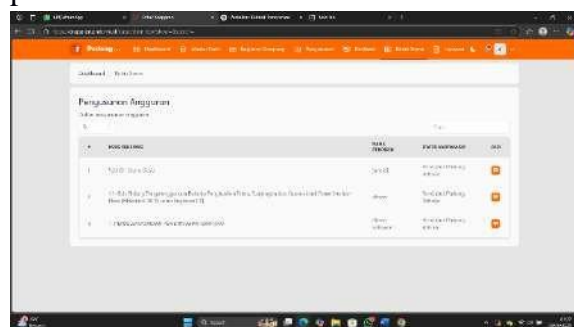
Halaman input realisasi APB Kampung adalah fitur yang digunakan untuk mencatat pelaksanaan atau pengeluaran Halaman Input Realisasi APB Kampung anggaran kampung yang telah direncanakan sebelumnya.



Gambar 12. Halaman input realisasi APB Kampung

10. Halaman Kotak Saran

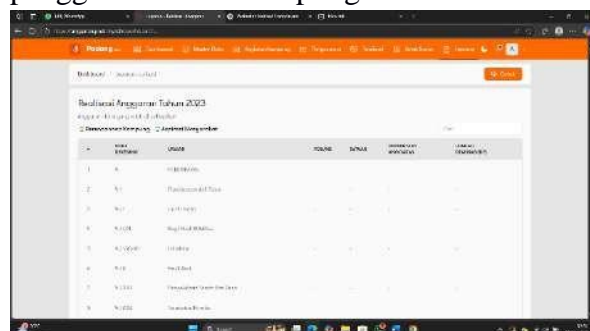
Halaman Kotak Saran adalah fitur interaktif yang disediakan untuk masyarakat kampung agar dapat menyampaikan aspirasi, kritik, saran, atau keluhan terkait pengelolaan dana kampung, kegiatan kampung, atau layanan pemerintahan.



Gambar 13. Halaman Kotak Saran

11. Halaman Laporan

Halaman Laporan adalah fitur dalam sistem yang digunakan untuk melihat, mencetak, atau mengunduh laporan akhir tahun terkait penggunaan dana kampung.



Gambar 14. Halaman Laporan

12. Halaman Cetak Laporan

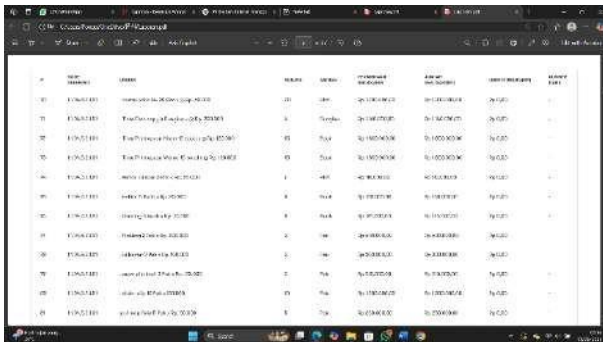
Halaman cetak laporan dalam sebuah sistem informasi berfungsi untuk menyajikan data dalam format yang siap dicetak sebagai dokumen fisik atau PDF. Tujuannya adalah untuk mempermudah dokumentasi, pelaporan kepada pihak terkait, serta sebagai arsip resmi.



Gambar 15. Halaman Cetak Laporan

13. Halaman Output PDF

Halaman output PDF dalam sistem informasi dirancang untuk menghasilkan laporan dalam *Portable Document Format* (PDF).












Gambar 16. Output PDF

B. Black box Testing





1. Pengguna Sebagai Admin

Tabel 1. Pengujian *Blackbox Admin*

No	Syarat	Hasil	Dapat Dijalankan	Tidak dapat dijalankan
1	Sistem berhasil melakukan login sebagai admin		[V]	
2	Sistem berhasil menampilkan data halaman input master data		[V]	
3	Sistem berhasil menampilkan data halaman input kegiatan kampung		[V]	
4	Sistem berhasil menampilkan data halaman input penyusunan anggaran		[V]	
5	Sistem berhasil menampilkan data halaman input realisasi anggaran		[V]	
6	Sistem berhasil menampilkan data halaman kotak saran		[V]	
7	Sistem Berhasil menampilkan data halaman laporan		[V]	
8	Sistem Berhasil mencetak data laporan		[V]	
9	Sistem berhasil memberikan output berupa pdf		[V]	

2. Pengguna Sebagai User

Tabel 2. Pengujian *Blackbox User*

No	Syarat	Hasil	Dapat Dijalan-kan	Tidak dapat dijalan-kan
1	Sistem berhasil menampilkan halaman utama		[V]	
2	Sistem berhasil menampilkan halaman kegiatan kampung		[V]	
3	Sistem berhasil menampilkan informasi realisasi anggaran		[V]	
4	Sistem berhasil menampilkan halaman kotak saran		[V]	

3. Pengujian Kuesioner Admin

Pengujian sistem ini dilakukan dengan memberikan *kuesioner* kepada Admin. Hal yang dilakukan pertama dengan mencoba menggunakan sistem sesuai dengan level user masing-masing responden mengisi beberapa daftar pertanyaan dalam bentuk *kuesioner*.

Hasil uji Responden yang dihitung menggunakan pengukuran *Skala Likert* yaitu:

Tabel 3. *Skala Likert*

Admin

Jumlah Responden	Jumlah point A	Jumlah point B	Jumlah point C	Jumlah Point D	Jumlah point E	Total Pertanyaan
2	6	4	0	0	0	5

Responden yang memilih A(5) = 6 x 5 = 30

Responden yang memilih B(4) = 4 x 4 = 16

Responden yang memilih C(3) = 0 x 3 = 0

Responden yang memilih D(2) = 0 x 2 = 0

Responden yang memilih E(1) = 0 x 1 = 0

Total Skor = 30 + 16 + 0 + 0 + 0 = 46

Y = 'skor tertinggi' x 'jumlah responden' =

5 x 10 = 50

X = 'skor terendah' x 'jumlah responden' =

1 x 10 = 10

Jadi, jika total skor penilaian *responden* diperoleh angka 46, maka penilaian interpretasi responden terhadap sistem informasi ini adalah hasil yang dihasilkan dengan menggunakan rumus index %.

Maka Penyelesaiannya adalah :

$$= \frac{\text{Total Skor}}{Y} \times 100$$

$$= \frac{46}{50} \times 100\%$$

= 92 % (A / Sangat Membantu)

4. Pengujian Kuesioner Masyarakat

Pengujian sistem ini dilakukan dengan memberikan *kuesioner* kepada masyarakat. Hal yang dilakukan pertama dengan mencoba menggunakan sistem sesuai dengan level user masing-masing responden mengisi beberapa daftar pertanyaan dalam bentuk *kuesioner*.

Hasil uji Responden yang dihitung menggunakan pengukuran *Skala Likert* yaitu:

Tabel 4. *Skala Likert* Masyarakat

Jumlah Responden	Jumlah point A	Jumlah point B	Jumlah point C	Jumlah Point D	Jumlah point E	Total Pertanyaan
250	148	102	0	0	0	5

Responden yang memilih A(5) = $148 \times 5 = 740$

Responden yang memilih B(4) = $102 \times 4 = 408$

Responden yang memilih C(3) = $0 \times 3 = 0$

Responden yang memilih D(2) = $0 \times 2 = 0$

Responden yang memilih E(1) = $0 \times 1 = 0$

Total Skor = $740 + 408 + 0 + 0 + 0 =$

1.148

$Y = \text{'skor tertinggi'} \times \text{'jumlah responden'} =$

$5 \times 250 = 1.250$

$X = \text{'skor terendah'} \times \text{'jumlah responden'} =$

$1 \times 250 = 250$

Jadi, jika total skor penilaian *responden* diperoleh angka 1.148, maka penilaian interpretasi responden terhadap sistem informasi ini adalah hasil yang dihasilkan dengan menggunakan rumus index %.

Maka Penyelesaiannya adalah :

$$= \frac{\text{Total Skor}}{Y} \times 100$$

$$= \frac{1.148}{1.250} \times 100\%$$

= 91,84 % (A / Sangat Membantu)

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat di simpulkan Sistem yang dibangun di kampung padang raharja mampu membantu aparatur kampung dalam mengelola data kegiatan, menyusun dan merealisasikan anggaran, serta menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat secara lebih terbuka, jelas, dan mudah diakses. Adanya fitur kotak saran membuka ruang partisipasi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan keluhan, sehingga sistem ini tidak

hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan peran aktif masyarakat dalam pemerintahan kampung. Berdasarkan hasil pengujian dan perhitungan kuesioner yang di berikan kepada responden, telah di peroleh bahwa responden aparat kampung (admin) mendapatkan hasil 92 %, Masyarakat 91,84 %. Di lihat dari hasil interval masing-masing peran, maka diperoleh hasil dalam wilayah sangat setuju.

REFERENSI

- [1] R. Adolph, "POLA KOORDINASI DALAM PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA," pp. 1–99, 2023.
- [2] E. Arribe and M. Ryandi, "Perancangan Sistem Informasi Absensi Fingerprint Berbasis Website PT . Media Andalan Nusa (Andalworks)," 2023.
- [3] A. H. Thaiybah, "ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA YANG LEBIH BERKUALITAS (STUDI PADA KANTOR LURAH GERUNG SELATAN)," vol. 2, no. 1, pp. 19–28, 2022.
- [4] S. P. M. T. Dr. Saberina Hasibuan *et al.*, *PENGGUNAAN APLIKASI POKDACOUNT DALAM PENGELOLAAN DATA KEUANGAN USAHA BUDIDAYA PERIKANAN*. Taman Karya, 2022. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=jTWvEAAAQBAJ>
- [5] S. E. M. A. Andres Putranta Sitepu, *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. CV. AZKA PUSTAKA, 2022. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=hW7KEAAAQBAJ>